ANALISA GENDER KABUPATEN SIDOARJO 2022

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Analisa Gender
Kabupaten Sidoarjo 2022

No. Publikasi	:	
Katalog	:	
Ukuran Buku	:	210 mm x 297 mm
Jumlah Halaman	:	44 + vii halaman
Naskah	:	Fungsi Statistik Sosial pada BPS Kabupaten Sidoarjo
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Gambar Kulit	:	Tri Febriani Widyawati, S.T
Diterbitkan Oleh	:	
Dicetak Oleh	:	

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Publikasi ini merupakan pandangan penulis seutuhnya dan tidak perlu mewakili pandangan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo

Kata Pengantar

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah mewujudkan kesetaraan gender. Hal ini selaras dengan amanat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945 bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra yang seimbang dan setara dalam pembangunan. Untuk mewujudkannya, Indonesia telah menetapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang responsive gender, tentunya dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Kehadiran publikasi "Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo 2022" diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan kebutuhan data yang dimaksud. Harapannya, publikasi ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan program, serta sebagai evaluasi pembangunan.

Akhir kata ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya publikasi ini. Semoga Tidak ada karya yang sempurna dan luput dari kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun bagi perbaikan publikasi ini di masa depan akan diterima dengan senang hati.

Sidoarjo, Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo,

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Grafik vii

Bab 1 Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 3

1.3. Sumber Data 3

1.4. Sistematika Publikasi 4

Bab 2 Metodologi 5

2.1. Konsep Definisi 5

2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender 7

Bab 3 Konsep IPM, IPG dan IDG 10

3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10

3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 15

3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 17

Bab 4 Indikator Analisa Gender 22

4.1. Karakteristik Demografi 22

4.2. Pendidikan 26

4.3. Kesehatan 28

4.4. Ketenagakerjaan 32

Bab 5 Analisa IPG dan IDG 38

5.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 38

5.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 40

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 42

6.1. Kesimpulan 42

6.2. Saran 42

Daftar Pustaka 44

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP) 13

Tabel 3.2 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM 13

Tabel 3.3. Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG 17

Tabel 4.1. Rasio Ketergantungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2021 25

Tabel 4.2. Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Pengeluaran, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2021 25

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 27

Tabel 4.4. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 35

Tabel 4.5. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Kedudukan dalam Pekerjaan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Persen) 36

Tabel 5.1. Indikator-indikator Pembentuk IPG dan Pertumbuhannya, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 38

Tabel 5.2 Indikator-indikator Pembentuk IDG, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 41

Daftar Grafik

Grafik 4.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 23

Grafik 4.2. Angka Kesakitan Penduduk Sidoarjo berdasar Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 (persen) 30

Grafik 4.3. Usia Harapan Hidup berdasar Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 (persen) 31

Grafik 4.4. Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2021 33

Grafik 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2021 34

Grafik 5.1. IPD dan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2021 39

1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi bahasan yang menarik untuk diulas, meski bagi sebagian masyarakat kesetaraan gender bukan sesuatu yang penting. Sejatinya, istilah "kesetaraan gender" merujuk pada karakteristik perempuan dan laki-laki yang dibangun atau dikonstruksi secara sosial (Wood, 2005). Secara sosial telah terbentuk pola piker bahwa menjadi perempuan harus seperti ini, menjadi laki-laki harus seperti itu. Terbentuknya pola pikir ini dipengaruhi oleh norma, budaya, ataupun agama yang membuat adanya peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang dianggap tepat atau merepresentasikan perempuan atau laki-laki.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2000) juga mengeluarkan definisi dari kesetaraan gender, yaitu: "…kesamaaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut". Di era sebelum tahun 2000an, representasi perempuan di pemerintahan masih sangat minim. Namun seiring berkembangnya waktu, saat ini perempuan sudah banyak berperan sebagai pemimpin atau pengambil keputusan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembentukan pola pikir sosial mengenai gender bersifat dinamis.

Komitmen dunia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pun dinyatakan dalam tujuan kelima dari tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Deklarasi SDGs ini telah disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada tanggal 25-27 November 2015. Hal tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan gender yang terutama kerap menimpa perempuan. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi

akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin.

Pemerintah juga memiliki komitmen yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkandung 17 tujuan. Setiap butir tujuan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda. Dari 17 tujuan, terdapat 169 target dalam SDGs. Selain itu, ada 16 tujuan dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan.

Posisi perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, secara khusus ada dalam tujuan ke-5 dengan target, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun;
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan;
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional;
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan capaian pembangunan manusia berbasis gender yang digunakan antara lain seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) untuk melihat perbandingan atau rasio antara pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengukur keadilan dan kesetaraan gender. Publikasi analisa Gender Kabupaten Sidoarjo 2022 diharapkan dapat memberikan wawasan bagi instansi pemerintah, maupun pihak-pihak yang terkait serta menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran dan wawasan mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi pembangunan gender perlu dipantau karena kesetaraan gender mempunyai dua nilai/manfaat, yakni intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik karena hidup yang sesuai pilihan pribadi dan tercukupi kebutuhan dasar tanpa melihat gender adalah hak asasi setiap manusia; kedua bernilai instrumental, artinya kesetaraan gender berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan pencapaian output pembangunan lainnya.

1.3. Sumber Data

Penyusunan publikasi ini menggunakan beberapa sumber yang berasal dari data Badan Pusat Statistik yaitu : Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta data/publikasi sekunder lainnya.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo 2022 ini terdiri dari lima bab, yakni :

Bab I Latar belakang yang berisi tentang pendahuluan, tujuan penyusunan publikasi, sumber data, dan sistematika penyajian.

Bab II Metodologi yang akan membahas tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang dipakai dalam publikasi ini

Bab III Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang membahas indikator-indikator, cara penghitungan dan hubungan antara IPM, IPG dan IDG.

Bab IV Indikator Analisa Gender yang membahas gambaran indikator-indikator penyusun IPG dan IDG di Kabupaten Sidoarjo

Bab V Analisa IPG dan IDG yang akan membahas series IPG dan IDG Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun

Bab VI Kesimpulan dan Saran yang akan menggarisbawahi temuan dan posisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo

Metodologi 2

2.1. Konsep dan Definisi

Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam analisis gender sebagaimana dikutip dari laman internet Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia :

Sex adalah perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Contoh: perempuan dapat melahirkan, laki-laki memproduksi sperma.

Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Gender dapat diartikan pula sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang

bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.

Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap pelayanan. Dengan kata lain kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Analisa Gender adalah metodologi untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tentang gender. Analisa gender membutuhkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan suatu pengertian dari konstruksi sosial dari peran gender, bagaimana pembagian kerja, dan dinilai. Analisa gender adalah proses dari analisa informasi supaya menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Analisa Gender digunakan juga untuk mengantisipasi dan menolak akibat negatif dari pembangunan yang mungkin terjadi pada perempuan atau karena relasi gender. Analisa gender dilakukan menggunakan bermacam alat dan kerangka kerja.

Sementara itu, merangkum definisi gender yang digunakan oleh WHO dan UNDP, pengertian gender mengacu pada karakteristik yang dikonstruksikan secara sosial dan psikologis, didefinisikan, atau ditautkan terhadap perempuan dan laki-laki seperti norma-norma, peran, relasi, hak-hak, dan kewajiban, serta identitas yang dapat berbeda dan berubah antar masyarakat, antar lokasi, dan antar waktu. (Handayani dan Pardede, 2017, p.341).

Oleh karena itu, Handayani dan Pardede (2017) mengingatkan bahwa menganalisis data menurut jenis kelamin tidak sama dengan ulasan mengenai disparitas gender, karena yang dimaksud dengan analisis gender adalah mengulas mengapa disparitas ini terjadi. Lebih lanjut, mereka mengingatkan bahwa istilah gender bukanlah mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan.

2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender

Kata kesetaraan dalam gender sebenarnya berasal dari terjemahan dua kata yang berbeda, yakni *equality* dan *equity*. *Equality* terkait dengan pernyataan bahwa manusia itu diciptakan setara (*equal*) tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa sederhana, ketika laki-laki mendapat satu bagian, maka perempuan juga mendapat satu bagian, atau tidak berbeda. Sementara itu, *equity* merujuk pada perlakuan yang adil dan setara berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, angka kematian ibu yang sering dipakai sebagai indikator kesetaraan gender, memang tidak menggambarkan kondisi laki-laki namun merujuk pada perlakuan yang adil bagi perempuan sesuai kebutuhannya.

Secara umum penyebab disparitas gender dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yakni penyebab alamiah (*nature*) dan penyebab yang dibentuk atau dikonstruksi (*nurture*). Bahasan mengenai penyebab disparitas gender ini juga dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu, yakni biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang biologi, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki bentuk kelamin yang berbeda. Dalam perkembangan ilmu biologi, maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan ditentukan oleh kehadiran dua kromosom yang berbeda yakni kromoson XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Namun, penjelasan ini kemudian banyak diperdebatkan karena tiap individu sebenarnya memiliki dua kromosom ini dengan kadar yang berbeda. Dua kromosom ini terhubung dengan kerja otak yang akan menentukan bentuk tubuh dan tingkah laku seseorang. Sayangnya, hingga saat ini para ahli biologi belum mengetahui secara pasti kadar kromosom ini dalam tubuh dan mekanisme hubungannya dengan otak sehingga seseorang bisa digolongkan maskulin atau feminin.

Psikolog membedakan gender dari sifat-sifat personalitas yang dimiliki oleh individu. Seseorang dikatakan maskulin kalau dalam dirinya terdapat sifat cerdas, berpikir strategis, dan logis. Kalau dalam diri seseorang melekat sifat penyayang, empati, dan hangat, maka ia akan dikatakan sebagai feminin.

Dalam perkembangannya, disadari bahwa sifat personal bukanlah seperti dua kutub yang saling berjauhan yang mudah dibedakan secara pasti, namun sifat-sifat personal ini bisa terdapat dalam diri seseorang sekaligus dalam kadar yang berbeda (*co-vary*).

Sosiolog menyatakan bahwa gender dibentuk dari perbedaan simbol, tingkah laku, interaksi, konteks, dan pengalaman hidup sehari-hari. Interaksi memegang peranan penting dalam ilmu sosiologi karena dari interaksi akan terbentuk peran gender (*gender roles*) yang diharapkan oleh lingkungan. Konsep peran gender (*roles*), yang mengacu pada kesamaan tingkah laku individu yang diharapkan oleh masyarakat lintas tempat, waktu, atau grup, banyak dikritik karena peran gender mengabaikan unsur kekuatan (*power*) dan keunggulan (*privilege*). Perempuan memang diharapkan berperan sebagai ibu dalam rumahtangga, namun konsep peran gender tidak menaruh perhatian pada kuasa perempuan dalam rumahtangga dan kelebihan/keunggulan sebagai ibu.

Dalam karyanya yang terkenal, West dan Zimmerman (1987) kemudian memperkenalkan konsep *doing gender*. Menurut mereka, tingkat maskulinitas dan feminitas diukur dari apa yang individu lakukan. Laki-laki yang memasak dan membantu merawat buah hati bisa dikategorikan sebagai feminin, sebaliknya perempuan yang bekerja bisa digolongkan sebagai maskulin. Dalam bahasa populernya, *to claim a sex category, we do gender*. Para sosiolog mengakui bahwa bukan atribut gender saja yang menyebabkan disparitas kesempatan antar individu, namun atribut-atribut lain turut memperparahnya (*intersectional theory*), misalnya kemiskinan, minoritas, dan lainnya. Dalam perkembangannya, sosiolog menggolongkan kategori sex bukan hanya laki-laki dan perempuan saja, namun juga seseorang dengan kondisi antara laki-laki dan perempuan dengan kehadiran *queer theory*.

Dalam ilmu ekonomi, disparitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh model modal manusia dan model segmentasi pasar kerja. Fokus dari model modal manusia adalah isu ketenagakerjaan, dimana perbedaan penghasilan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kepemilikan

modal manusia yang berbeda, misalnya pendidikan. Sementara itu menurut model segmentasi pasar kerja, pasar kerja laki-laki dan perempuan memang berbeda, dimana laki-laki cenderung bekerja di sektor utama (*primary*) dengan jabatan yang lebih tinggi, sementara perempuan bekerja di sektor kedua (*secondary*) dengan jabatan dan upah yang lebih rendah.

Statistical discrimination menyatakan bahwa ketika laki-laki atau perempuan yang memiliki kualitas yang sama dan menginginkan pekerjaan yang sama, meski pengusaha tidak memiliki dugaan terhadap jenis kelamin tertentu, tapi dia mengetahui bahwa perempuan cenderung memiliki waktu bekerja lebih sedikit karena tanggung jawabnya dalam mengurus rumahtangga, maka perempuan akan cenderung dikeluarkan sebagai kandidat terbaik.

Konsep IPM, IPG dan IDG 3

Sebelum pembahasan lebih lanjut terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo, perlu diulas terlebih dahulu mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta hubungannya dengan IPG, sehingga dapat memberikan gambaran lebih detail tentang penghitungan IPG.

3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

- ✓ **Umur Harapan Hidup saat Lahir**

Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (indirect estimation). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi

sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

- ✓ **Tingkat Pendidikan**

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata- rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

- ✓ **Standar Hidup Layak**

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS

dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

- ✓ **Penyusunan Indeks**

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel 3.1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 3.2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Tabel 3.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakal	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	The	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam	Kue kering	Perawatan
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cinc	Transportasi/pengangkutan
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah
Pisang raja	Rokok kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara -Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

- ✓ **Status Pembangunan Manusia**

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok "sangat tinggi" : IPM ≥ 80
- Kelompok "tinggi" : 70 ≤ IPM < 80
- Kelompok "sedang" : 60 ≤ IPM < 70
- Kelompok "rendah" : IPM < 60

- ✓ **Pertumbuhan IPM**

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} x100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

3.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

- ✓ **Bagaimana Metode Baru?**

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2) pengetahuan (*knowledge*); dan
3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

- ✓ **Penyusunan Indeks Komposit**

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing- masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung

sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing- masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing- masing komponen.

Tabel 3.3 : Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Minimum		Maksimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Umur Harapan Hidup (tahun)	17,55	22,5	82,5	87,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	0	18	18
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)	1.007.436		26.572.352	

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \text{ x } I_{pendidikan_p} \text{ x } I_{pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan_L} \text{ x } I_{pendidikan_L} \text{ x } I_{pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} x100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

- ✓ **Perubahan Interpretasi**

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

3.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salat satu alat untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu akan dihitung *Equally Distributed Equivalent Percentage* (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

- Indeks Keterwakilan di Parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m}\right)^{-1} x100$$

dan

$$I_{(par)} = {\{EDEP_{(par)}\}}/{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

- Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m}\right)^{-1} x100$$

dan

$$I_{(DM)} = \{EDEP_{(DM)}\}/_{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga professional

- Indeks Distribusi Pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

Komponen	Satuan	Minimum	Maksimum
Pengeluaran per kapita	Rupiah	a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst)	732.720

$$\text{Rasio Upah}_\text{i} = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_\text{i}}{\text{Upah buruh nonpertanian}_\text{m}}$$

$$\text{Rata} - \text{rata Upah}_\text{i} = (\text{Rasio upah}_m \text{ x Proporsi Angkatan Kerja}_m) + (\text{Rasio upah}_f \text{ x Proporsi Angkatan Kerja}_f)$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata} - \text{rata Upah}_\text{i} = \frac{\text{Rasio Upah}_\text{i}}{\text{Rata} - \text{rata Upah}_\text{m}}$$

$$\text{Sumbangan Pendapatan}_\text{i} = \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \text{ x Rasio terhadap Rata} - \text{rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_\text{i} = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_\text{i}}{\text{Proporsi Penduduk}_\text{m}}$$

dimana

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m}\right)^{-1} x100$$

$$I_{(inc-dis)} = \frac{\left(EDEP_{(inc-dis)} \text{ x Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}\right) - 360}{732{,}72 \; - \; 300}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

- Indeks Pemberdayaan Gender

  Selanjutnya penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IDG = \frac{\left(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)}\right)}{3}$$

4 Indikator Analisa Gender

Tujuan dari pembuatan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Berbagai indikator yang dapat memberikan informasi pembangunan gender akan diulas pada bab ini.

4.1. Karakteristik Demografi

Analisis tentang pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo akan diawali dengan pembahasan distribusi penduduk menurut karakteristik demografi, yakni kelompok umur, jenis kelamin kepala rumahtangga, tingkat kesejahteraan, dan angka ketergantungan. Pembahasan distribusi gender menurut karakteristik demografi menjadi sangat penting untuk memastikan apakah keberadaan perempuan telah representatif atau masih termarginalkan dalam karakteristik demografi tertentu. Keberadaan perempuan yang marginal biasanya akan memperparah tingkat kesenjangan gender yang ada, atau disebut *intersection*.

Sebaran penduduk menurut kelompok umur sering ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Selain menampilkan struktur penduduk menurut kelompok umur, piramida penduduk juga mampu mendeteksi mengenai hilangnya (*missing*) jenis kelamin tertentu. Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 4.1. berikut.

Grafik 4.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

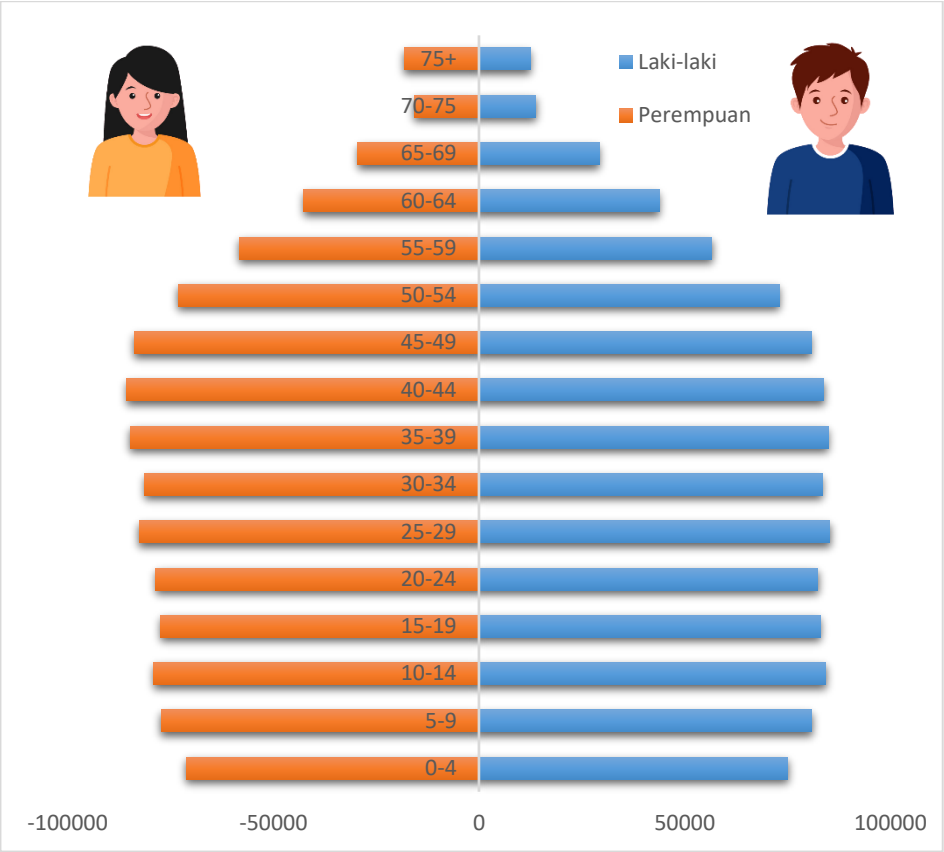

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

Secara umum terlihat bahwa penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Sidoarjo hampir seimbang. Seimbangnya jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tidak adanya kejadian tertentu yang beresiko terhadap kesehatan penduduk, seperti kematian ibu yang akut atau kejadian tertentu yang beresiko terhadap kesehatan penduduk.

Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, menunjukkan pola yang membesar pada tengah dengan sedikit lebih lebar pada umur awal (0-9 tahun). Pola ini memberikan indikasi adanya fertilitas yang sedikit lebih tinggi pada dasawarsa terakhir dibanding dengan periode sebelumnya. Dinamika kependudukan antara kelompok penduduk laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perbedaan, dimana jumlah penduduk kelompuk usia muda untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan pola ini ternyata berubah ketika kita melihat kelompok umur 65 tahun keatas. Hal ini mengindikasikan adanya kelahiran yang lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki dan ada dugaan

bahwa *survival rate* awal kehidupan pada jenis kelamin laki-laki lebih tinggi. Untuk kelompok umur di atas 65 tahun jumlah perempuan lebih banyak mengindikasikan angka harapan hidup yang lebih tinggi pada jenis kelamin perempuan.

Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur berkisar antara 96 hingga 107 pada usia sampai dengan 69 tahun. Rasio lebih dari 100 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Akan tetapi pada kelompok umur 40-50 tahun, 55 -59 tahun serta umur 65 tahun keatas, rasio ini turun perlahan hingga mencapai 68 pada usia 75+. Hal ini mengindikasikan penduduk perempuan lebih memiliki kelangsungan hidup lebih panjang dibanding laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan tingginya angka harapan hidup perempuan dibanding laki-laki sehingga jumlah lansia perempuan tentunya lebih banyak dibanding lansia laki-laki. Sementara itu, berkurangnya penduduk laki-laki pada usia produktif (40-50) di Kabupaten Sidoarjo sering dikaitkan dengan fenomena migrasi keluar seiring banyaknya relokasi perusahaan/pabrik keluar dari wilayah Sidoarjo dalam rangka mencari upah pekerja yang lebih murah mengingat upah pekerja di Kabupaten Sidoarjo tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Gresik

Ukuran demografi lain yang menggunakan karakteristik umur adalah rasio ketergantungan. Dari sisi demografi, ukuran ini dimaksudkan untuk melihat potensi rumahtangga dalam menghasilkan pendapatan. Jika suatu rumahtangga memiliki lebih banyak anggota usia produktif daripada non produktif (anak-anak dan lansia), maka rumahtangga tersebut diharapkan mempunyai sumber penghasilan yang cukup untuk menanggung beban anggota rumahtangga yang non produktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk pada kelompok umur 15-64, sementara penduduk usia non produktif terdiri dari anak-anak berumur 0-14, dan lansia berumur 65+.

Tabel 4.1. Rasio Ketergantungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2021

Tahun		Rasio Ketergantungan		
		Usia Muda	Usia Tua	Total
2019	L	35,93	5,13	41,06
	P	34,19	6,73	40,92
	L + P	35,06	5,93	40,99
2020	L	35,92	5,14	41,06
	P	34,19	6,73	40,92
	L + P	35,06	5,93	40,99
2021	L	31,75	7,34	39,08
	P	30,42	8,49	38,90
	L + P	31,09	7,91	38,99

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020

Sementara rasio ketergantungan dilihat berdasar kelompok pengeluaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Pengeluaran, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 – 2021

Kelompok Pengeluaran	Rasio Ketergantungan		
	2019	2020	2021
40 persen terbawah	51,17	47,59	45.90
40 persen tengah	35,86	39,80	37.25
20 persen teratas	30,82	27,89	29.20

Sumber : BPS, Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019-2021

Tabel 4.1 dan 4.2 menunjukkan rasio ketergantungan menurut jenis kelamin dan tingat kesejahteraan. Terlihat pada tabel bahwa pada tahun 2021 secara umum rasio ketergantungan sebesar 38,99 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 39 penduduk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan penduduk laki-laki sebesar 39,08 sedikit lebih tinggi dibandingkan rasio ketergantungan penduduk perempuan sebesar

38,99. Rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 31,09 sedangkan ketergantungan penduduk usia tua sebesar 7,91. Dapat diartikan bahwa tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 32 penduduk yang usianya masih muda dan 8 penduduk yang usianya tua.

Dari tabel 4.2 secara umum terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka rasio ketergantungan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumahtangga yang lebih sejahtera, jumlah anggota rumahtangga (ART) non produktif yang harus ditanggung oleh ART produktif semakin sedikit. Hal ini selanjutnya akan memberi kesempatan kepada ART produktif untuk menumpuk kekayaan.

4.2. Pendidikan

Menurut Bank Dunia (2012), partisipasi sekolah mengandung nilai investasi dan nilai instrumental yang akan menentukan perbedaan kesempatan di masa depan. Yang dimaksud nilai investasi adalah seseorang yang bersekolah cenderung akan mempunyai kesehatan yang baik dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, yang dimaksud mengandung nilai instrumental adalah seseorang yang bersekolah relatif mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, disparitas pada pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan gender menjadi sulit dikurangi.

Tak lupa, perempuan yang berpendidikan relatif mampu memutus kesenjangan gender bagi generasi berikutnya. Perempuan berpendidikan akan mampu membuat keputusan yang baik tentang alokasi belanja bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pekerja yang produktifitasnya tinggi di kemudian hari dan memperoleh pendapatan yang lebih baik, bahkan menjadi calon ibu yang sehat dan hebat.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7-12	99,78	99,42	99,59
13-15	98,35	100,00	99,13
16-18	90,02	84,47	87,45
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	99,04	99,42	99,24
SMP	88,70	91,06	89,81
SMA	73,35	68,24	70,98
Angka Partisipasi Kasar (APK)			
SD	102,25	104,31	103,31
SMP	98,18	100,42	99,23
SMA	126,47	125,25	125,90

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

Tabel 4.3 menunjukkan partisipasi sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2021 hampir seluruh penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun saat itu tengah bersekolah yang ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah (APS). APS yang hampir mencapai 100 menunjukkan keterbukaan peluang untuk bersekolah di Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini jelas menunjukkan ketiadaan kesenjangan gender dalam dunia pendidikan, padahal pada masa dulu perempuan mempunyai keterbatasan akses pendidikan. Beberapa sebab meningkatnya partisipasi sekolah perempuan adalah program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, imbal balik pendidikan yang semakin besar, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Indikator angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Hal ini menunjukkan adanya fenomena murid bersekolah tidak sesuai umur pada tahun-tahun

sebelumnya. Selisih nilai yang positif antara APK dan APM mengindikasikan kejadian telat masuk jenjang pendidikan tertentu atau mengulang atau drop out.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator yang berguna untuk melihat adanya murid yang bersekolah di jenjang tertentu, namun berusia di luar usia normal jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai APK jenjang SD dan SMA baik untuk laki-laki maupun perempuan lebih dari 100, kecuali untuk jenjang SMP. Hal ini menunjukkan keberadaan penduduk usia sekolah yang lebih lambat atau terlalu cepat masuk ke jenjang pendidikan SD dan SMA.

4.3. Kesehatan

Tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan harus diakui memang berbeda. Ada setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi disparitas kesehatan dan kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor hormonal dan genetika, faktor yang berhubungan dengan gaya hidup, dan faktor sosial.

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa hormon perempuan (estrogen) memberi keuntungan dalam hal pemberian proteksi kekebalan tubuh. Dengan hormon tersebut, perempuan relatif lebih kebal terhadap penyakit menular daripada laki-laki, setidaknya jika laki-laki dan perempuan sakit dengan penyebab yang sama, maka sakit laki-laki lebih parah dibanding perempuan. Begitu pula dengan reaksi terhadap vaksinasi, kekebalan tubuh perempuan akan lebih kuat dibanding reaksinya terhadap tubuh laki-laki. Hal ini

selanjutnya akan menentukan perbedaan tingkat kesakitan dan kematian antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal kromosom, sebagaimana diketahui bahwa tubuh laki-laki mengandung kromosom XY dan tubuh perempuan mengandung kromosom XX. Dalam satu kromosom X terkandung 1100 gen yang berhubungan dengan proses fisiologis dan satu kromosom Y terkandung kurang dari 100 gen yang akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Keberadaan dua kromosom X dalam tubuh perempuan tentu memberi kekebalan tubuh lebih kuat terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan kromosom X-seperti hemophilia A. Tambahan lagi, setengah gen dari kromosom X pada perempuan bersifat aktif dan setengahnya lagi bersifat non aktif, sementara pada laki-laki seluruh gen pada kromosom X bersifat aktif. Hal ini juga meningkatkan resiko laki-laki terhadap paparan penyakit yang disebabkan oleh kromosom X dibanding perempuan. Hal ini kemudian memberi keuntungan kesehatan lebih kepada perempuan daripada laki-laki secara biologis.

Dalam faktor gaya hidup, kebiasaan merokok dan minum-minuman keras jelas membedakan tingkat kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan perempuan untuk mengatur pola makannya dengan asupan makanan sehat dan bergizi jelas menguntungkan perempuan, sementara laki-laki yang melakukan hal yang sama dianggap kurang maskulin. Kebiasaan olahraga perempuan yang kontinyu sepanjang hidupnya juga memberi manfaat lebih pada perempuan, sementara aktifitas olahraga pada laki-laki biasanya terhenti setelah dewasa. Hal ini disebabkan motivasi laki-laki untuk berolahraga memang untuk prestasi dan menunjukkan kekuatan fisiknya, sementara untuk perempuan memang cenderung untuk menjaga kesehatan.

Penjelasan dari sisi sosial, tingkat pendidikan jelas memberi pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan dalam hal kemudahan akses terhadap pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan akses terhadap jaminan kesehatan. Tingkat kesehatan juga berbeda antara pengangguran dan pekerja, yang berupah/gaji tinggi dengan yang lebih rendah meski temuan ini mungkin mengandung *selection bias*. Maksudnya adalah sebenarnya bukan status

menganggur/bekerja yang membedakan tingkat kesehatan seseorang, tapi secara logika kondisi sehat memungkinkan seseorang (terseleksi) untuk bekerja.

Grafik 4.2. Angka Kesakitan Penduduk Sidoarjo berdasar Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 (persen)

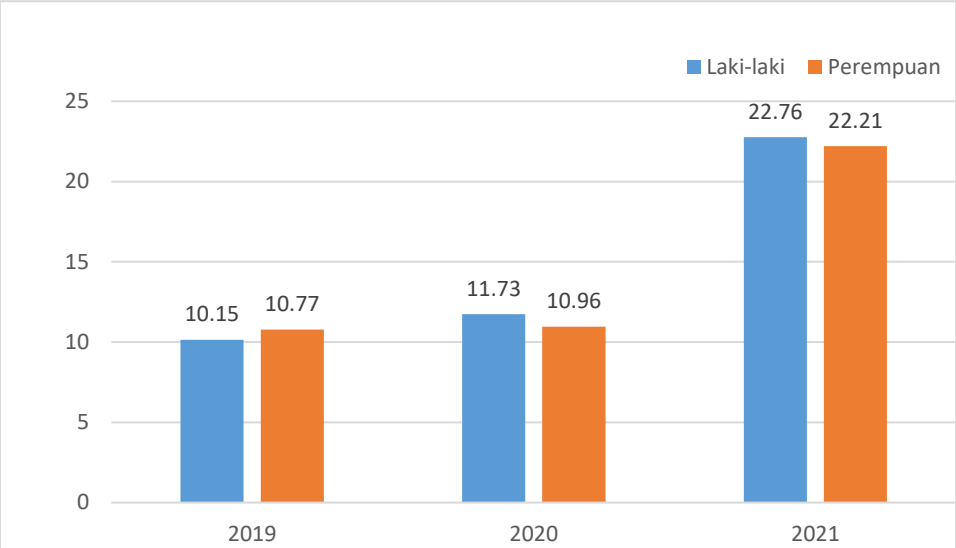

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2021

Dari grafik 4.2 di atas terlihat bahwa tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan bervariasi. Dua tahun terakhir, angka kesakitan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Angka kesakitan juga meningkat signifikan terkait dengan pandemic Covid-19. Angka kesakitan laki-laki pada tahun 2021 sebesar 22,76, sedangkan perempuan sebesar 22,21 persen. Laki-laki yang notabene sebagai pekerja lebih banyak beraktivitas di luar rumah dan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan dengan perempuan.

Komponen kesehatan lain dalam penghitungan IPG adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perkiraan rata-rata lamanya hidup yang dijalani seseorang sejak ia dilahirkan. Indikator ini juga berguna dalam mengidentifikasi kualitas kesehatan. Semakin lama umur hidup yang dijalani merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya, walaupun kesehatan bukan merupakan satu-satunya indikator peluang hidup lama seseorang.

Grafik 4.3. Usia Harapan Hidup berdasar Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021 (persen)

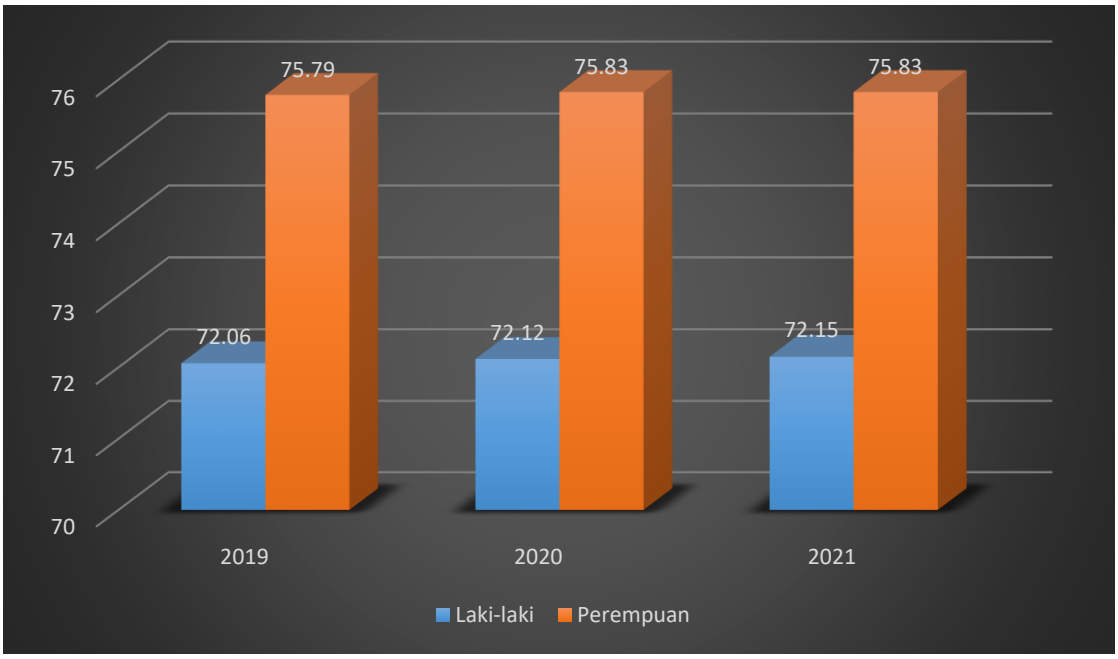

Sumber : BPS, Publikasi IPM 2021

Berdasar grafik diatas, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dengan kesenjangan sekitar 4 tahun. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari faktor biologis hingga gaya hidup.

Faktor lain yang mencerminkan usia harapan hidup laki-laki lebih rendah diantaranya adalah :

- Tingkat paparan pekerjaan yang lebih tinggi terhadap bahaya fisik dan kimia.
- Perilaku yang berkaitan dengan norma sebagai laki-laki.
- Paradigma perilaku kesehatan terhadap maskulinitas, seperti laki-laki yang cenderung tidak mengunjungi dokter saat sakit.

4.4. Ketenagakerjaan

Kesetaraan gender memiliki relevansi terhadap perekonomian suatu negara. Dengan tercapainya keseteraan gender, semua warga negara memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas dalam kegiatan perekonomian, baik produksi maupun konsumsi. Indikator ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan IPG meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Kedua indikator ini berfungsi untuk melihat seberapa besar penyerapan pasar kerja akibat bertambahnya penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun keatas, sedangkan usia produktif adalah yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun.

Melihat grafik 4.4 di bawah ini, komposisi penduduk berdasar kegiatan utamanya seminggu yang lalu di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dinamika seiring perubahan kondisi pasar kerja. Jumlah penduduk 15+ yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menyerap pasokan tenaga kerja. Namun, pada tahun 2021 jumlah pekerja menurun cukup siginifikan, dari 1.066.792 penduduk bekerja pada tahun 2021 menjadi 1.021.884 penduduk bekerja di tahun 2021 ini. Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

Grafik 4.4. Penduduk Usia 15+ menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2021

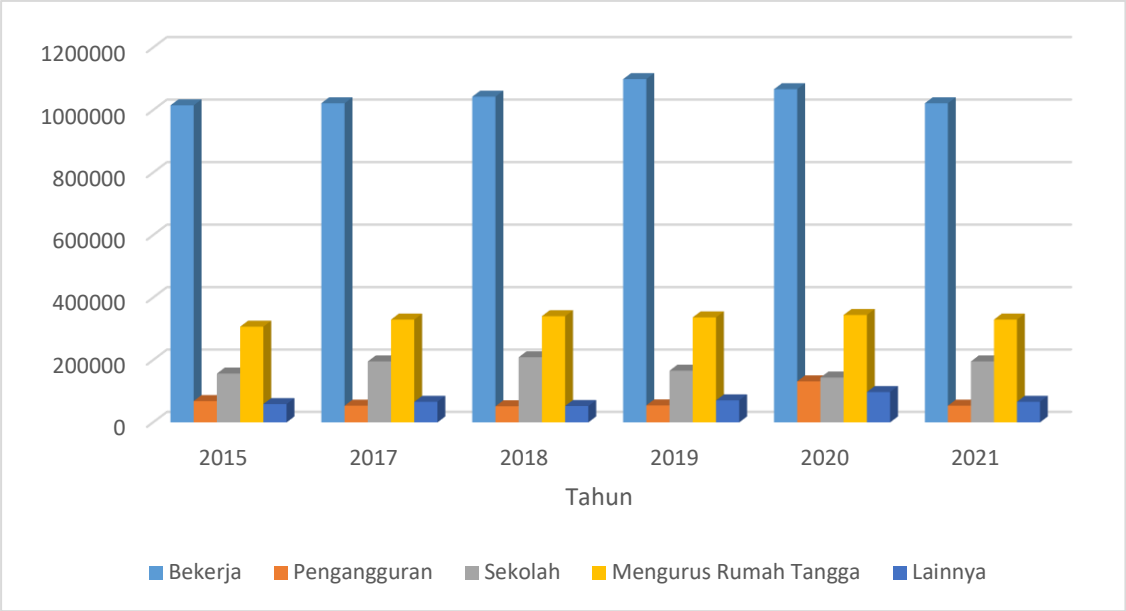

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2015-2021

Selama periode 2015-2021, jumlah pekerja telah bertambah sebesar 208 ribu. Peningkatan jumlah pekerja terbesar terjadi pada tahun 2021-2021, sebesar 157 ribu pekerja, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian di Kabupaten Sidoarjo akibat pandemi covid-19. Sebelum adanya pandemi covid-19 kondisi ketenagakerjaan Sidoarjo relatif lebih baik yang ditandai oleh rendahnya tingkat pengangguran pada angka 1 digit. Efek pandemi covid-19 menjadikan jumlah penganggur meningkat secara signifikan, hingga mencapai 2 digit dan angka ini menjadi angka tertinggi di Provinsi Jawa Timur akibat kehilangan pekerjaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan .

Dalam beberapa tahun terakhir, proporsi pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo mengalami sedikit pergeseran. Pengangguran yang awalnya didominasi oleh perempuan, namun dalam tiga tahun terakhir TPT laki-laki menjadi lebih menonjol (grafik 4.5). Terlebih lagi, pandemi Covid-19 yang yang berdampak terhadap perekonomian dunia, tak terlepas juga berefek di Kabupaten Sidoarjo. Sektor industri yang menyerap cukup banyak pekerja tidak sedikit yang tutup akibat pandemi Covid-19. Hal ini turut meningkatkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi tahun 2021, pengangguran di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya turun beberapa poin saja. Dari 10,97 persen di tahun 2020 menjadi 10,87 persen di tahun 2021 ini. Penganggur laki-laki masih tetap lebih tinggi dibandingkan penganggur perempuan, meskipun demikian penganggur perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan pengganggur laki-laki mengalami penurunan. Menganalisis tingkat pengangguran menurut jenis kelamin tentu tidak terlepas dari peran gender di masyarakat. Laki-laki dalam rumahtangga identik dengan pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan demikian, laki-laki akan terus mencari kerja sebagai perwujudan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah keluarga. Oleh karena itu, menjadi wajar kalau tingkat pengangguran laki-laki menjadi lebih tinggi daripada perempuan.

Grafik 4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2021.

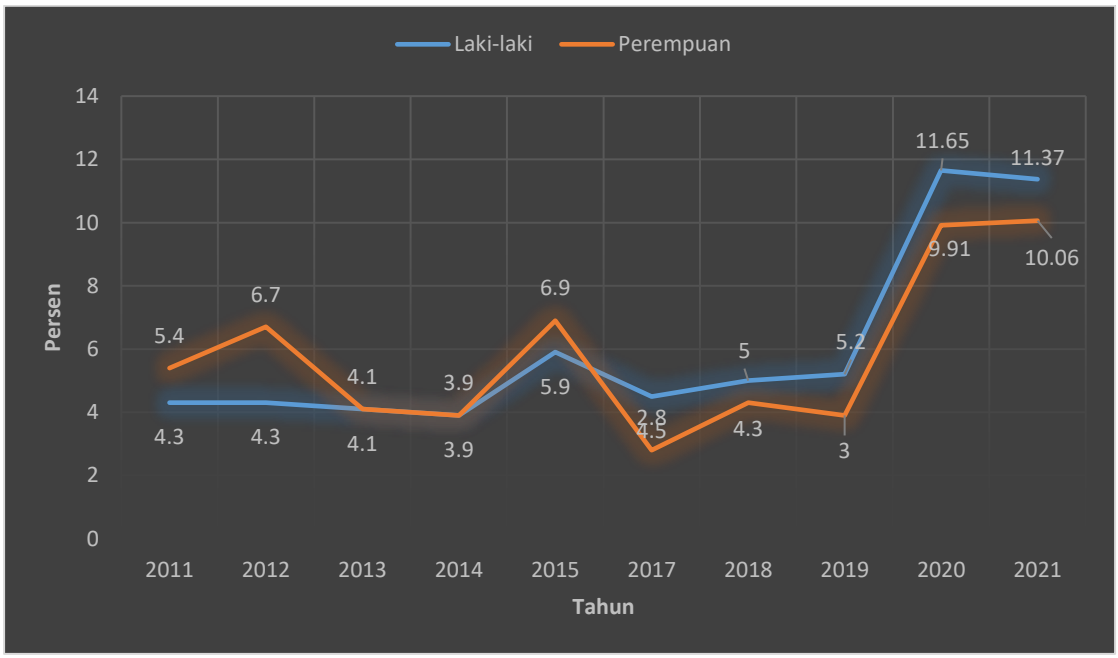

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2011-2021

➢ Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan merupakan tempat bekerjanya seseorang yang menggambarkan jenis/bidang pekerjaan. Dalam pembahasan ini lapangan pekerjaan yang dimaksud adalah lapangan pekerjaan yang utama. Apabila seseorang mempunyai lebih satu jenis pekerjaan maka yang dimasukkan

adalah yang utama. Lapangan pekerjaan yang utama ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang menghabiskan waktu terbanyak menghasilkan pendapatan paling besar.

Data Sakernas 2021 menyebutkan sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo bekerja pada sektor jasa sebesar 57,44 persen dari total penduduk bekerja. Sektor jasa mengalami perkembangan yang cukup siginifikan dalam tiga tahun terakhir, karena sebelumnya sektor industri lah yang paling utama. Pada tabel 4.4 terlihat seperti kondisi tahun sebelumnya bahwa pekerja perempuan banyak terserap di sektor jasa. Sekitar 70 persen pekerja perempuan berada di sektor ini, sisanya 29 persen bekerja di sektor industry dan hanya sekitar 1 persen bekerja di sektor pertanian.

Kondisi ini dimungkinkan berkaitan dengan sifat yang dibawa perempuan lebih lembut, lebih teliti, lebih tekun, lebih menarik, dan tidak banyak menuntut daripada pekerja laki-laki. Sifat-sifat pekerja seperti ini sangat cocok bagi sektor jasa yang sedang berkembang di Sidoarjo. Beberapa lowongan pekerjaan bahkan jelas-jelas mencantumkan jenis kelamin perempuan sebagai calon pekerja yang dikehendaki. Akhirnya, pekerja laki-laki menjadi kalah bersaing dengan pekerja perempuan di sektor jasa ini.

Tabel 4.4. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1. Pertanian	27,372	4.15	4,093	0.99	31,465	2.93
2. Industri	305,651	46.33	120,043	28.96	425,694	39.63
3. Jasa	326,722	49.52	290,309	70.05	617,031	57.44
	659,745	**100.00**	**414,445**	**100.00**	**1,074,190**	**100.00**

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2021

➢ Status Kedudukan dalam Pekerjaan

Status kedudukan dalam pekerjaan memberikan gambaran tentang kemampuan serta posisi dalam bidang pekerjaan tersebut. Seseorang yang berkedudukan sebagai pengusaha tentu berbeda dengan karyawan dan juga mereka yang berstatus sebagai pekerja dibayar juga akan berbeda dengan mereka yang berstatus pekerja tak dibayar. Status kedudukan dalam pekerjaan juga mencerminkan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan juga dapat memberikan gambaran besaran pendapatan yang diterima pekerja.

Tabel 4.5. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Status Kedudukan dalam Pekerjaan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Persen)

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1. Berusaha sendiri	16.31	19.52	17.54
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar	4.69	7.71	5.86
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	3.13	1.33	2.44
4. Buruh/karyawan/ pegawai	62.32	58.16	60.72
5. Pekerja bebas di pertanian	1.52	0.70	1.21
6. Pekerja bebas di non pertanian	8.77	1.93	6.13
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar	3.25	10.66	6.11
	100.00	**100.00**	**100.00**

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2021

Tabel 4.5 memperlihatkan, mayoritas penduduk Kabupaten Sidoarjo baik laki-laki maupun perempuan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu 62,32 persen untuk pekerja laki-laki dan 58,16 persen pekerja perempuan. Hal ini bersesuaian mengingat Kabupaten Sidoarjo merupakan kota dengan sektor jasa dan industri dengan perkembangan yang cukup pesat dan yang pastinya banyak menyerap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena menarik lain adalah bahwa persentase pekerja perempuan yang bersatus berusaha sendiri dan berusaha dibnatu buruh/pekerja keluarga atau tidak dibayar lebih besar dibandingkan laki-laki.

Kondisi ini menunjukkan peran perempuan dalam pekerjaan utama semakin terlihat. Perempuan yang makin banyak mengelola usaha mikro kecil dan menengah, serta adanya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan sektor UMKM menjadi pendorong makin tingginya perempuan sebagai pengusaha. Potensi perempuan yang dikenal telaten, mandiri, dan pantang menyerah juga menjadi modal utama untuk menjadi wirausaha yang sukses dan perempuan berdaya.

Analisa IPG dan IDG 5

Dengan mengamati indikator-indikator pembentuk dimensi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, berikut gambaran IPG dan IDG Kabupaten Sidoarjo.

5.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki laki, masing-masing 75,83 tahun dan 72,12 tahun. Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu 10,80 tahun dan 10,02 tahun untuk jenis kelamin yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya, besaran masing-masing indikator pembentuk IPG dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1 Indikator-indikator Pembentuk IPG dan pertumbuhannya, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Proporsi penduduk (%)	50,25	49,75	50,25	49,75	50,34	49,66
Dimensi Umur Panjang dan Sehat						
Angka Harapan Hidup (e^0/Tahun)	72,06	75,79	72,12	75,83	72,15	75,83
Dimensi Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah / EYS (Tahun)	14,81	15,04	14,83	15,06	14,84	15,07
Rata-Rata Lama Sekolah/ MYS (Tahun)	10,79	9,72	10,80	10,03	10,95	10,27
Dimensi Kehidupan yang Layak						
Pengeluaran Perkapita (Juta)	20,29	14,06	20,14	13,90	20,28	14,05
IPM menurut Gender	**84,05**	**78,83**	**84,05**	**79,12**	**84,32**	**79,48**
IPG	**93,79**		**94,13**		**94,26**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Nilai IPG=100 memberikan gambaran bahwa laki-laki dan perempuan telah terbangun secara setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 94,26; angka IPG ini lebih tinggi daripada capaian angka IPG Jawa Timur yang sebesar 91,67 IPG Sidoarjo tahun 2021 meningkat tipis dibanding tahun 2020 yang sebesar 0,13 poin. Melihat tren perkembangan angka IPG Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik 4.1, angka IPG Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2011 hingga 2021 mengalami fluktuasi dalam kisaran sempit. Untuk diketahui, IPG tahun 2016 tidak bisa disajikan karena survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan terkait penghematan anggaran oleh pemerintah.

Grafik 5.1. IPD dan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2021

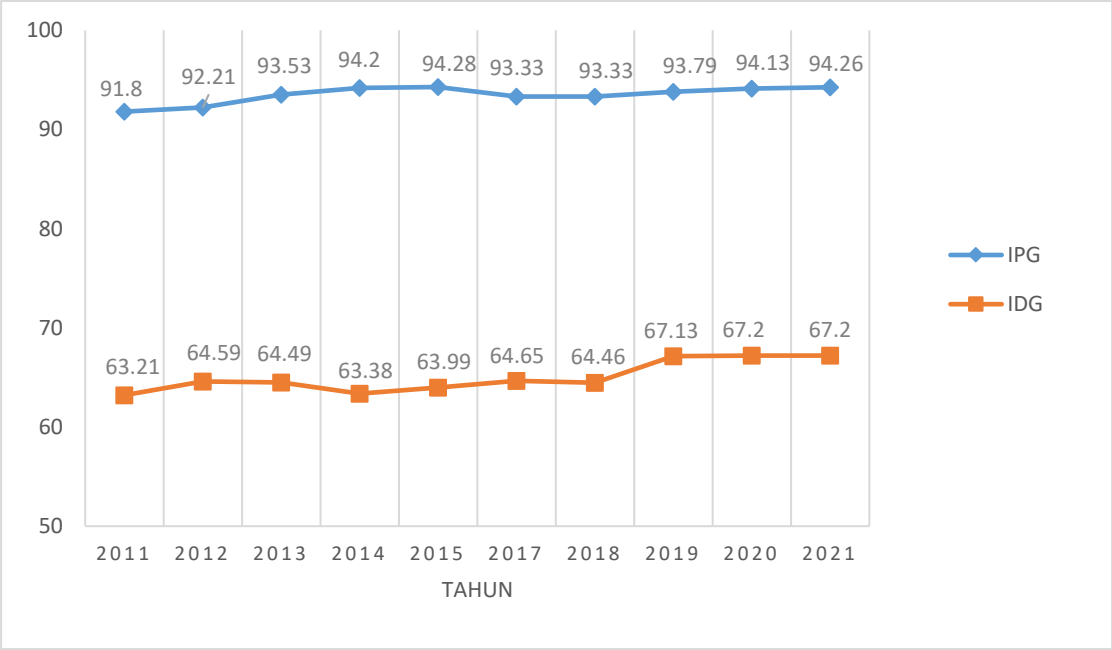

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Secara umum, angka IPG Kabupaten Sidoarjo cenderung naik pada periode 2011-2021. Angka IPG sempat turun pada tahun 2017 sebesar 1,01 persen menjadi 93,33 dibanding tahun 2015 yang sebesar 94,28. Hal ini

disebabkan oleh meningkatnya IPM laki-laki yang relatif lebih tinggi dibanding IPM perempuan. Ada dua komponen yang menyebabkan penurunan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Pada tahun 2019 IPG Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2021 ini. IPG Sebagaimana terlihat pada tabel 4.5, semua komponen IPM tumbuh hampir sama cepat antara laki-laki dan perempuan.

Komponen harapan lama sekolah, rata-rata sekolah dan pendapatan per kapita penduduk perempuan meningkat dibandingkan tahun 2020, meskipun angkanya tidak lebih besar daripada laki-laki. Sementara angka harapan hidup dan harapan lama sekolah, tumbuh lebih cepat pada laki-laki dibanding perempuan. IPM mengalami peningkatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Peningkatan angka IPM pada laki-laki lebih sedikit daripada IPM perempuan. IPM perempuan naik sebesar 0,36 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan IPM laki-laki yang pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan 0,27 poin. Hal ini yang kemudian membuat IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 meningkat 0,13 poin dibanding IPG tahun 2020.

5.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer,

administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Capaian IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 sebesar 67,10. Sedikit terjadi penurunan angka IDG dibandingkan kondisi tahun 2020 sebesar 0,1 persen. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknis yang berpengaruh pada turunnya indikator dimensi partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan sebagaimana terlihat pada tabel 4.6.

Tabel 5.2. Indikator-indikator Pembentuk IDG, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2021

Indikator	2019		2020		2021	
	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan	Laki-laki	Perem-puan
(1)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
Proporsi penduduk (%)	50,25	49,75	50,25	49,75	50,34	49,66
Dimensi Partisipasi Politik						
Keterwakilan di Parlemen (%)	84	16	84	16	84	16
Dimensi Partisipasi Ekonomi & Pengambilan Keputusan						
Proporsi dari Tenaga Profesional (%)	48,39	51,61	48,39	51,61	48,70	51,30
Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi						
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	70,46	29,54	70,36	29,64	70,23	29,77
IDG	**67,13**		**67,20**		**67,10**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Kesimpulan dan Saran 6

Sesuai tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Berikut disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan.

6.1. Kesimpulan

1. Saat ini pembangunan bidang pendidikan telah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi, bahkan perempuan cenderung meraup manfaat lebih besar dengan meningkatnya partisipasi sekolah.
2. Saat ini perempuan juga tengah menikmati hidup yang lebih lama daripada laki-laki. Hal ini berlaku juga terhadap angka kesakitan perempuan, dimana tahun 2021 angka kesakitan perempuan lebih baik dan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pandemi Covid-19 masih menjadi faktor tingginya angka kesakitan laki-laki.
3. Partisipasi kerja perempuan masih tetap rendah. Sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah sektor jasa.
4. Pembangunan manusia perempuan Sidoarjo telah mencapai kategori tinggi, Terlihat angka IPG di Kabupaten Sidoarjo naik dalam tiga tahun terakhir.
5. Tantangan pemberdayaan gender di Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan porsi perempuan yang bekerja sebagai manager, profesional, administrasi, dan teknisi serta keterwakilan perempuan di parlemen.

6.2. Saran

1. Pemberian edukasi dan konsultasi tentang kesetaraan gender dan manfaatnya bagi kesejahteraan rumahtangga dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya masih perlu dilakukan terus menerus melalui berbagai media dan kepada berbagai pihak. Tanpa kesadaran semua pihak, terutama lembaga pemerintahan, maka pembangunan gender tidak akan mendapat dukungan.

2. Dunia kerja perlu dibuat seramah mungkin kepada pekerja perempuan, terutama pekerja perempuan yang telah memiliki anak. Karena sebagian besar keluarga di Sidoarjo bertipe keluarga inti, perempuan yang bekerja akan membuat anak tanpa pengasuhan. Oleh karena itu, penyediaan *daycare* yang ramah dan murah perlu mendapat dukungan.
3. Perempuan perlu didorong dan dikondisikan untuk mempunyai suara dalam menentukan kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan, seperti pendirian koperasi wanita (kopwan), perlu diperluas kepada bidang-bidang lain.
4. Dalam bidang ketenagakerjaan, mungkin perlu dicoba aturan pemberlakuan kuota untuk pekerja perempuan sebagaimana kuota perempuan di parlemen.
5. Perlunya peningkatan pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi digital bagi perempuan sehingga dapat meningkatkan kapasitas, bertahan di saat sulit pandemi serta mampu bersaing dengan dalam era teknologi informasi yang serba digital seperti saat ini.

Daftar Pustaka

Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi : Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.

BPS Provinsi Jawa Timur (2021). *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

BPS Kabupaten Sidoarjo (2021). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo

BPS Kabupaten Sidoarjo (2020). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo

BPS Kabupaten Sidoarjo (2021). *Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo

BPS Kabupaten Sidoarjo (2020). *Laporan Eksekutif Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo

BPS Provinsi Jawa Timur (2021). *Perempuan dan Laki-laki Provinsi Jawa Timur 2021*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

BPS Provinsi Jawa Timur (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2021*. Surabaya : BPS Provinsi Jawa Timur

Priyono, Edy (2015). *Memahami Pasar Tenaga Kerja : Bacaan Ekonomi untuk non Ekonom, cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Lentera

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021). *Pembangunan Manusia berbasis Gender Tahun 2021*. Jakarta : KemenPPPA dan BPS

GENDER EQUALITY
RIGTHS
FAIRNESS
FREEDOM
POWER